

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LARANGAN PENGUMUMAN IDUL FITRI MANDIRI PADA MEDIA TEMPO DAN KOMPAS

Dewi Iim Durrotul Hikmah¹, Nur Anjelina Siregar^{2*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

^{2*}Universitas Kairo, Mesir

*Jalan Marsda Adisucipto No. 1, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

E-mail: durrotuldewiim@gmail.com¹⁾
nanjelina761@gmail.com^{2)*}

Received 15 Mei 2026; Received in revised form 2 Juni 2026; Accepted 8 Juni 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan mengenai perbedaan penetapan Idul Fitri 1447 Hijriah pada media Tempo dan Kompas.com menggunakan model framing Robert N. Entman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing yang meliputi empat elemen, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media memiliki framing yang berbeda dalam mengonstruksi realitas sosial terkait perbedaan Idul Fitri. Tempo membingkai isu sebagai persoalan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama terhadap warga Muhammadiyah. Media ini menonjolkan kasus intoleransi, kritik terhadap pemerintah dan masyarakat, serta pentingnya pluralisme dan perlindungan hak beragama. Sementara itu, Kompas.com membingkai isu sebagai persoalan persatuan umat dan legitimasi pemerintah dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri. Kompas.com lebih menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial, menghormati keputusan pemerintah, dan mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan framing tersebut menunjukkan bahwa media memiliki sudut pandang dan konstruksi realitas yang berbeda dalam memberitakan isu keagamaan sehingga dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa.

Kata Kunci: framing media, Robert Entman, Idul Fitri, Tempo, Kompas.com, media online.

Abstract

This study aims to analyze the framing of news regarding the difference in the determination of Eid al-Fitr 1447 Hijri in Tempo media and Kompas.com using Robert N. Entman's framing model. This study uses a descriptive qualitative approach with a framing analysis method that includes four elements, namely define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation. The results of the study show that the two media have different framing in constructing social realities related to the differences in Eid al-Fitr. Tempo framed the issue as a matter of discrimination and violation of religious freedom against Muhammadiyah citizens. This media highlights cases of intolerance, criticism of the government and society, and the importance of pluralism and the protection of religious rights. Meanwhile, Kompas.com framed the issue as a matter of unity of the people and the legitimacy of the government in determining Eid al-Fitr. Kompas.com emphasized the importance of maintaining social harmony, respecting government decisions, and maintaining Islamic ukhuwah. These differences in framing show that the media has different viewpoints and reality constructions in reporting religious issues so that they can affect people's understanding of an event.

Keywords: media framing, Robert Entman, Eid al-Fitr, Tempo, Kompas.com, online media.



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A.PENDAHULUAN

Dinamika penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, pemerintah melalui mekanisme sidang isbat menegaskan posisinya sebagai otoritas tunggal yang berwenang menentukan awal bulan Syawal.(Andriana 2019:137) Penegasan ini diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa keputusan resmi pemerintah seharusnya menjadi rujukan bersama bagi seluruh umat Islam. Dengan demikian, ruang bagi pihak atau organisasi lain untuk mengumumkan Idul Fitri secara mandiri sebelum keputusan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan semangat kesatuan nasional.

Dalam konteks ini, penetapan Idul Fitri tidak lagi dipandang sekadar sebagai persoalan perbedaan metode hisab dan rukyat, tetapi juga menyangkut ketertiban sosial dan otoritas keagamaan dalam negara. Pemerintah, yang melibatkan berbagai unsur seperti ahli falak dan perwakilan organisasi Islam, dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan keputusan sepihak dari kelompok tertentu. Oleh karena itu, muncul kesan bahwa semua pihak diharapkan bahkan secara moral dituntut untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Himbauan untuk menjaga persatuan umat menjadi dasar normatif dari penegasan ini.(Mushonnif 2013:173) Perbedaan dalam menentukan hari raya dipandang berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial, sehingga keseragaman dianggap sebagai solusi untuk menjaga harmoni. Dalam kerangka ini, kepatuhan terhadap keputusan pemerintah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga diposisikan sebagai bagian dari komitmen menjaga ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan berbangsa.

Dalam tafsir *Al-Mishbah*, M.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ulil amri merujuk pada pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan negara, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ia juga menegaskan bahwa istilah ulil amri tidak selalu disertai dengan kewajiban taat secara mutlak, karena ketaatan tidak berlaku apabila mereka menyimpang dari ketentuan Islam. Sebaliknya, apabila kebijakan mereka sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, maka wajib untuk ditaati, meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan individu. Adapun makna taat menurut beliau mencakup sikap tunduk, mendampingi, serta menerima ketentuan dengan penuh keikhlasan.(Sugiarti and Kudhori 2024:159)

Dalam QS An Nisa ayat 59 di jelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam realitas kehidupan, sering dijumpai adanya sikap penolakan terhadap pemimpin yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pengalaman hidup maupun afiliasi politik, terutama ketika pemimpin

tersebut berasal dari kelompok yang sebelumnya menjadi rival. Meskipun demikian, ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan tetap menjadi kewajiban selama kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak mengarah pada kemungkaran, walaupun secara pribadi terdapat ketidaksukaan terhadap sosok pemimpin tersebut karena masa lalu tertentu. Kondisi seperti ini bahkan dapat terjadi dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, hadis tersebut menjadi pedoman bahwa ketaatan kepada pemimpin tetap harus dijalankan, meskipun dalam keadaan tidak sepenuhnya berkenan, selama tidak mengandung ajakan kepada kemungkaran.

Dengan demikian, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai larangan, narasi yang berkembang menunjukkan adanya penegasan kuat bahwa organisasi masyarakat dan kelompok keagamaan sebaiknya tidak mendahului pemerintah dalam menetapkan Idul Fitri, serta diharapkan mengikuti keputusan resmi demi menjaga stabilitas dan persatuan umat.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan transformasi besar dalam dunia komunikasi, khususnya melalui kehadiran media online. Media online merupakan bentuk media massa yang berbasis internet dan memungkinkan distribusi informasi secara cepat, real-time, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, media online kini bertransformasi menjadi ruang publik baru yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi sekaligus dalam pembentukan opini masyarakat. (Safitri, Satyadharma, and Asis 2025)

Berbeda dengan media konvensional seperti surat kabar atau televisi, media online memiliki karakteristik interaktif, fleksibel, dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batas geografis. Dalam konteks perkembangan internet, media sosial tidak dapat dipisahkan dari dinamika media online. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan oleh individu untuk membagikan berbagai peristiwa dalam kehidupan mereka, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses dan melihat representasi diri orang lain, tetapi juga menjadi ruang interaksi global yang memungkinkan komunikasi lintas batas geografis.

Dalam kaitannya dengan media online, keberadaan media sosial turut memperkuat proses penyebaran berita sekaligus memengaruhi cara isu dibingkai (framing), karena informasi yang beredar tidak hanya disampaikan, tetapi juga dikonstruksi melalui sudut pandang tertentu yang dapat membentuk persepsi dan opini publik secara luas. (Widiantari 2025:79)

Dalam konteks Indonesia, media online seperti Kompas.com dan Tempo memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, terutama terkait isu-isu keagamaan. Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian adalah polemik penetapan Hari Raya Idul Fitri, khususnya terkait larangan pengumuman Idul Fitri secara mandiri oleh kelompok tertentu di luar keputusan pemerintah.

Perbedaan cara pandang media dalam memberitakan isu ini dapat dianalisis melalui pendekatan framing. Teori framing yang dikembangkan oleh

Robert N. Entman menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai realitas melalui seleksi isu, penekanan aspek tertentu, serta interpretasi yang memengaruhi cara audiens memahami suatu peristiwa. (Hafidli et al. 2023:180) Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dua media online, Kompas.com (<https://nasional.kompas.com/read/2026/03/19/21071571/mui-sebut-penetapan-idul-fitri-kewenangan-pemerintah-umat-diminta-jaga> n.d.) dan

Dalam buku *Analisis Framing*, Eriyanto menjelaskan bahwa analisis framing digunakan untuk menelaah bagaimana media mengonstruksi realitas. Fokus utama dari pendekatan ini terletak pada proses pembentukan pesan dalam teks, yakni bagaimana suatu peristiwa atau informasi disusun dan dikemas oleh media. (Mulyana 2002)

Model analisis framing yang dikembangkan oleh Entman menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam studi media massa. Dalam pandangannya, framing dilihat melalui dua dimensi utama, yaitu pemilihan isu dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas. Entman menjelaskan bahwa konsep framing memberikan cara untuk memahami

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan cermat tentang fakta-

Tempo (Tempo n.d.), dalam membingkai pemberitaan terkait larangan pengumuman Idul Fitri mandiri.

Analisis framing merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk memahami bagaimana media membingkai serta membangun suatu peristiwa atau realitas tertentu. (Hidayat and Prasetyo 2023:7) Pendekatan ini digunakan untuk melihat cara media menyusun dan menampilkan suatu kasus sehingga membentuk pemahaman tertentu di masyarakat.

bagaimana teks komunikasi memiliki kekuatan dalam membentuk makna. (Sofian and Lestarini 2021:60) Analisis framing juga menunjukkan bagaimana informasi yang disampaikan melalui pidato, pernyataan, maupun berita dapat memengaruhi kesadaran dan cara pandang manusia terhadap suatu peristiwa.

Selanjutnya, Euis Sri Nurhayati menjelaskan bahwa teknik dalam analisis framing model Robert M. Entman terdiri atas empat tahapan utama, yaitu mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, membangun penilaian moral, serta menekankan solusi atau penyelesaian. Tahapan-tahapan tersebut menjadi dasar dalam penggunaan analisis framing model Robert M.

fakta aktual dan karakteristik populasi tertentu. Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (setting alami). Metode ini juga disebut sebagai metode etnographi karena awalnya digunakan untuk penelitian tentang antropologi budaya. Metode

penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.(Sugiyono, 2013:8) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang fenomena, situasi, dan kondisi yang dibahas.

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data

Dari definisi framing Robert N Entman mengatakan “framing merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan

Teknik analisis yang analisis framing model Robert N Entman, yang mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing:(2020:225) Define problems (pendefinisian masalah) adalah komponen yang merupakan frame utama. Diagnose causes (memperkirakan masalah/sumber masalah), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Make moral judgement (membuat keputusan moral), elemen

Tabel 1. Skema Framing Model Robert M. Entman

| | |
|--|--|
| <i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah) | Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Dilihat sebagai apa? Dilihat sebagai masalah apa? |
| <i>Diagnose Causes</i> (Penyebab atau sumber masalah) | Apa penyebab dari peristiwa atau isu tersebut? Apa yang dianggap sebagai sumber masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? |

deskriptif dari perilaku dan kata-kata individu yang dapat diamati. Dalam keadaan seperti ini, orang atau organisasi tidak boleh dianggap sebagai variabel atau hipotesis sebaliknya, mereka harus dianggap sebagai bagian dari keutuhan.²¹ Setelah itu, alat analisis framing Robert N Entman akan digunakan untuk menganalisis objek penelitian.(Sari Lubis 2013:39)

menulis berita”. Entman melihat framing melalui dua dimensi besar yaitu, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas atau pun isu.(Kriyantono 2009:255)

digunakan adalah framing yang digunakan untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Treatment recommendation (menekankan penyelesaian), digunakan untuk menilai keinginan wartawan, dan cara penyelesaian masalah. Tentu saja, penyelesaian tergantung pada perspektif orang tentang peristiwa dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Menurut Eriyanto (2002)

| | |
|---|--|
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral) | Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi sebuah tindakan? |
| <i>Treatme Recommendations</i> (Menekankan penyelesaian) | Solusi apa yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah atau isu? Jalan seperti apa yang ditawarkan/perlu ditempuh untuk mengatasi masalah atau isu? |

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berita Tempo. Com

Analisis framing terhadap berita “SETARA Kritik Diskriminasi Akibat Perbedaan Idul Fitri”(Tempo n.d.) dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman yang terdiri atas empat elemen utama, yaitu Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media Tempo melakukan seleksi isu dan penonjolan isu dalam pemberitaan terkait perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Framing membongkar bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui pemilihan isu tertentu untuk ditampilkan secara lebih menonjol. Melalui proses tersebut, media dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Berdasarkan hasil analisis, Tempo membingkai isu ini sebagai persoalan kebebasan beragama dan toleransi yang masih menghadapi tantangan di Indonesia. Dalam proses seleksi isu, Tempo memilih fakta-fakta yaitu berkaitan dengan: *Pertama*. Dugaan pelanggaran kebebasan beragama, *Kedua*. Penolakan terhadap warga Muhammadiyah, *Ketiga*. Konflik sosial akibat perbedaan hari raya, dan *keempat* lemahnya toleransi masyarakat.

Sementara itu, penonjolan isu dilakukan melalui penggunaan diksi seperti “diskriminasi”, “pelanggaran”, “dicegat”, dan “dipaksa membubarkan diri”. Kata-kata tersebut memberikan kesan bahwa tindakan terhadap warga Muhammadiyah merupakan persoalan serius dan tidak sesuai dengan nilai kebhinekaan Indonesia. Tempo juga

menempatkan kasus-kasus diskriminasi di beberapa daerah sebagai bukti konkret adanya persoalan sosial yang lebih besar. Dengan demikian, media membingkai masalah sebagai isu nasional terkait toleransi dan hak beragama.

1. Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Pada tahap define problems, Tempo mendefinisikan peristiwa perbedaan Idul Fitri bukan sekadar perbedaan penanggalan keagamaan, tetapi sebagai persoalan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Media menempatkan isu ini sebagai masalah serius yang berkaitan dengan hak warga negara dalam menjalankan keyakinannya.

Hal tersebut terlihat dari kutipan awal berita yang menyatakan:

“SETARA Institute mencatat tiga kasus dugaan pelanggaran terhadap warga Muhammadiyah salat Idul Fitri karena berbeda dengan pemerintah.”

Kutipan tersebut langsung menempatkan fokus berita pada dugaan diskriminasi terhadap warga Muhammadiyah. Tempo memilih untuk menonjolkan adanya tindakan pelanggaran dan penghalangan ibadah sebagai inti masalah yang perlu diperhatikan publik.

Pendefinisian masalah semakin diperkuat melalui pernyataan Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan:

“Perbedaan keyakinan, yang berimplikasi pada perbedaan cara dan kriteria dalam penentuan Hari Raya Idul Fitri, adalah bagian dari kebebasan internal (forum internum) yang tidak boleh diintervensi oleh pihak eksternal manapun.”

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa Tempo membingkai perbedaan penetapan Idul Fitri sebagai bagian dari hak kebebasan beragama yang seharusnya dilindungi negara. Dengan demikian, persoalan utama yang dibangun media bukan mengenai benar atau salahnya penetapan Idul Fitri, melainkan bagaimana negara dan masyarakat menyikapi perbedaan tersebut.

2. Diagnose Causes (Penyebab atau Sumber Masalah)

Pada tahap diagnose causes, Tempo membingkai penyebab masalah sebagai akibat dari rendahnya toleransi masyarakat dan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kebhinekaan. Hal ini terlihat dari kutipan pernyataan Halili Hasan: “Kasus di tiga lokasi tersebut menunjukkan kesalahan perspektif dan tindakan pemerintah dan masyarakat.” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Tempo mengarahkan pembaca untuk melihat pemerintah dan sebagian masyarakat sebagai pihak yang turut bertanggung jawab terhadap munculnya diskriminasi. Tempo juga menampilkan beberapa kasus yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama, yaitu: *Pertama*, Penolakan izin penggunaan Lapangan Merdeka di Kota Sukabumi, *Kedua*. Pencegatan jemaah Muhammadiyah di Kabupaten Barru, *Ketiga*. Larangan salat Id di Kedungwinong, Sukoharjo.

Kasus-kasus tersebut dipilih sebagai fakta utama untuk memperkuat framing bahwa diskriminasi benar-benar terjadi di lapangan. Penyebab masalah juga dikaitkan dengan lemahnya pemahaman terhadap pluralisme dan keberagaman. Hal ini tampak dalam kutipan:

“Masalah utama adalah lemahnya literasi intra dan inter-agama,

meningkatnya segregasi, dan menyempitnya ruang perjumpaan lintas identitas.”

Melalui kutipan tersebut, Tempo membangun pemahaman bahwa akar persoalan tidak hanya berasal dari perbedaan Idul Fitri, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat yang semakin intoleran. Selain itu, media juga menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Halili menyatakan: “Pandangan atau fatwa MUI seharusnya tidak diperlakukan sebagai satu-satunya acuan keagamaan yang menghapus keragaman pandangan.” Kutipan ini menunjukkan bahwa Tempo turut membingkai dominasi satu pandangan keagamaan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok lain.

Dalam tahap diagnose causes, Tempo melakukan penonjolan isu dengan: *Pertama*. Menampilkan kutipan kritik secara dominan, *Kedua*. Memilih narasumber dari lembaga HAM, *Ketiga*. Menekankan tindakan aparat dan masyarakat, *Keempat*. Serta menyoroti lemahnya toleransi sosial. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa persoalan diskriminasi terjadi akibat kegagalan masyarakat dan pemerintah dalam menghargai keberagaman.

3. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Pada tahap make moral judgement, Tempo menghadirkan nilai-nilai moral yang menekankan pentingnya toleransi, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap keberagaman. Tempo menggunakan pernyataan Halili Hasan untuk memperkuat nilai moral tersebut:

“Negara tidak boleh diskriminatif dengan mengistimewakan satu

kelompok warga di atas yang lain.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa media membangun penilaian moral bahwa tindakan diskriminasi terhadap Muhammadiyah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebhinekaan.

Nilai moral juga diperkuat melalui penjelasan mengenai identitas Indonesia sebagai negara yang plural:

“Para pendiri negara telah menetapkan Indonesia sebagai Negara Pancasila, Negara Berbhineka, Negara ‘Satu untuk Semua, Semua untuk Satu, Semua untuk Semua’.”

Melalui kutipan tersebut, Tempo menonjolkan bahwa toleransi merupakan bagian dari nilai dasar bangsa Indonesia. Dengan demikian, tindakan pelarangan salat Id dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Selain itu, Tempo juga menghadirkan pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir:

“Tidak perlu mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain.”

Kutipan ini memberikan pesan moral bahwa perbedaan dalam penetapan Idul Fitri seharusnya tidak menjadi sumber konflik sosial.

Dalam framing moral ini, Tempo membangun citra Muhammadiyah sebagai pihak yang mengedepankan toleransi dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Sebaliknya, tindakan pelarangan ibadah dibingkai sebagai bentuk intoleransi yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tempo secara moral berpihak pada perlindungan hak kebebasan beragama dan penghormatan terhadap

perbedaan.

4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Pada tahap treatment recommendation, Tempo menampilkan solusi berupa pentingnya pendidikan toleransi, penguatan kebhinekaan, dan peran negara dalam melindungi hak warga negara.

Halili Hasan menyatakan: “Peran pemerintah sebagai representasi negara untuk mendidik masyarakat agar toleran dan terbiasa dengan perbedaan.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Tempo mendorong pemerintah agar lebih aktif dalam membangun budaya toleransi di masyarakat. Selain itu, solusi juga ditawarkan melalui peran tokoh agama:

“Tokoh agama mesti terus mendidik warga masyarakat untuk berfikir, bersikap, dan bertindak toleran terhadap aneka perbedaan dalam tata kebhinekaan Indonesia.”

Tempo membingkai bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya melalui aturan hukum, tetapi juga memerlukan pendidikan sosial dan keagamaan yang menanamkan nilai toleransi. Haedar Nashir juga memberikan rekomendasi moral kepada masyarakat:

“Semua pihak harus menahan diri.”

Kutipan tersebut menekankan pentingnya sikap saling menghormati dalam menghadapi perbedaan pandangan keagamaan.

Framing tersebut menunjukkan bahwa Tempo berusaha membangun opini publik bahwa perbedaan penetapan Idul Fitri merupakan hal wajar dalam masyarakat plural, sedangkan tindakan diskriminatif merupakan persoalan utama yang harus

dikritik.

Berita Kompas. Com

Analisis framing terhadap berita “MUI Sebut Penetapan Idul Fitri Kewenangan Pemerintah, Umat Diminta Jaga Persatuan”(Kompas n.d.) menggunakan model framing Robert N. Entman yang terdiri atas empat elemen utama, yaitu Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kompas.com membingkai isu perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Dalam teori framing Robert Entman, media melakukan seleksi terhadap fakta tertentu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas agar membentuk pemahaman publik sesuai sudut pandang media. Berdasarkan hasil analisis, Kompas.com membingkai isu ini sebagai persoalan persatuan umat dan pentingnya mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri.

Berbeda dengan framing media Tempo yang lebih menonjolkan isu diskriminasi dan kebebasan beragama, Kompas.com lebih menekankan pada legitimasi pemerintah, pentingnya persatuan, dan penghormatan terhadap otoritas negara dalam menentukan awal Syawal.

Dalam proses seleksi isu, Kompas.com memilih fakta-fakta yang berkaitan dengan: *Pertama*. Kewenangan pemerintah dalam sidang isbat, *Kedua*. Pentingnya persatuan umat, *Ketiga*. Fatwa MUI mengenai penetapan awal Syawal, *Keempat*, Kelima. jakan menjaga kebersamaan.

Berbeda dengan media Tempo

yang lebih fokus pada kasus diskriminasi, Kompas.com tidak menampilkan konflik sosial atau penolakan terhadap Muhammadiyah. Media ini lebih menonjolkan aspek legitimasi keputusan pemerintah dan stabilitas sosial. Penonjolan isu dilakukan melalui: *Pertama*. Penggunaan istilah “kewenangan pemerintah”, *Kedua*. Penekanan pada “persatuan umat”, *Ketiga*. Pemilihan kutipan yang mendukung keputusan pemerintah, *Keempat*. Penempatan MUI sebagai otoritas keagamaan.

1. Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Pada tahap define problems, Kompas.com mendefinisikan persoalan utama bukan sebagai konflik atau diskriminasi, melainkan sebagai perbedaan penetapan Idul Fitri yang perlu disikapi dengan menjaga persatuan umat Islam. Hal tersebut terlihat dari judul berita:

“MUI Sebut Penetapan Idul Fitri Kewenangan Pemerintah, Umat Diminta Jaga Persatuan.”

Judul tersebut langsung menunjukkan fokus utama berita, yaitu penegasan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri serta pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Pendefinisian masalah juga terlihat dalam kutipan pernyataan Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis:

“Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan di tengah masyarakat.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai perbedaan Idul Fitri sebagai sesuatu yang dapat memicu perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, pemerintah diposisikan sebagai

pihak yang memiliki otoritas untuk menjaga keseragaman dan ketertiban sosial.

2. Diagnose Causes (Penyebab atau Sumber Masalah)

Pada tahap diagnose causes, Kompas.com membingkai penyebab munculnya perbedaan sebagai akibat dari perbedaan metode penentuan hilal dan keyakinan keagamaan dalam menentukan awal Syawal. Hal tersebut terlihat dari kutipan:

“Prinsipnya adalah meninggalkan yang meragukan dan mengambil yang meyakinkan, karena secara hisab hilal tidak mungkin terlihat dan di lapangan juga tidak terlihat.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyebab perbedaan Idul Fitri dipahami sebagai persoalan metode hisab dan rukyat, bukan sebagai konflik politik ataupun diskriminasi sosial. Kompas.com juga menampilkan penjelasan bahwa keputusan pemerintah merujuk pada fatwa dan hasil musyawarah ulama:

“Keputusan tersebut juga merujuk pada hasil musyawarah serta fatwa MUI pada 2004 yang menyatakan bahwa kewenangan mengumumkan awal Ramadhan dan Idul Fitri berada di tangan pemerintah.”

Melalui kutipan tersebut, media membangun pemahaman bahwa pemerintah memiliki dasar hukum dan legitimasi keagamaan dalam menetapkan Idul Fitri. Selain itu, Kompas.com menampilkan pernyataan:

“Keputusan serupa juga ditegaskan dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU), yang melarang pengumuman penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri selain oleh pemerintah.”

Kutipan ini memperkuat framing

bahwa otoritas pemerintah dalam menentukan awal Syawal merupakan hasil kesepakatan organisasi keagamaan besar di Indonesia. Dengan demikian, diagnose causes dalam berita ini menunjukkan bahwa perbedaan Idul Fitri dipandang sebagai konsekuensi metode penetapan hilal yang berbeda, namun penyelesaiannya harus tetap berada dalam kewenangan pemerintah.

3. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Pada tahap make moral judgement, Kompas.com menghadirkan nilai moral berupa pentingnya persatuan, penghormatan terhadap otoritas pemerintah, serta menjaga ukhawah Islamiyah di tengah perbedaan. Hal ini terlihat dari kutipan:

“Namun demikian, kita tetap menghormati saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan berbeda dalam menentukan hari raya.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa media membingkai perbedaan sebagai sesuatu yang tetap harus dihormati selama tidak merusak persatuan umat. Nilai moral juga terlihat dalam ajakan untuk menjaga kebersamaan:

“Umat Islam untuk menjaga kebersamaan dan nilai-nilai yang telah dibangun selama bulan Ramadan agar terus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari.”

Melalui kutipan tersebut, Kompas.com menonjolkan bahwa semangat Ramadan harus diwujudkan dalam bentuk toleransi, kesederhanaan, dan solidaritas sosial. Selain itu, media juga menampilkan pesan moral terkait gaya hidup dan kepedulian sosial:

“Sedekah adalah bukti keimanan. Kebiasaan baik selama Ramadan harus

terus dijaga di bulan-bulan berikutnya sebagai tanda diterimanya ibadah kita.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa Kompas.com tidak hanya membahas persoalan penetapan Idul Fitri, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai moral keagamaan. Dalam framing moral ini, Kompas.com menempatkan pemerintah dan MUI sebagai pihak yang berupaya menjaga persatuan dan stabilitas sosial. Media tidak membangun narasi konflik, melainkan menonjolkan pesan damai dan persaudaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompas.com membangun framing moral yang moderat dan harmonis dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Islam.

4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Pada tahap treatment recommendation, Kompas.com menawarkan solusi berupa kepatuhan terhadap keputusan pemerintah, penghormatan terhadap perbedaan, dan penguatan nilai persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dalam kutipan:

“Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan di tengah masyarakat.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa solusi utama yang ditawarkan adalah mengikuti keputusan pemerintah demi menjaga persatuan sosial. Selain itu, Kompas.com juga menampilkan solusi berupa toleransi terhadap kelompok yang berbeda pandangan:

“Kita tetap menghormati saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan berbeda dalam menentukan hari raya.”

Media membingkai bahwa perbedaan penentuan Idul Fitri tidak

perlu menjadi sumber konflik, selama masyarakat tetap saling menghormati. Rekomendasi penyelesaian juga tampak pada ajakan untuk mempertahankan nilai Ramadan:

“Kebiasaan baik selama Ramadan harus terus dijaga di bulan-bulan berikutnya.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial. Melalui framing tersebut, Kompas.com membangun pemahaman bahwa perbedaan Idul Fitri harus disikapi dengan kedewasaan, penghormatan terhadap otoritas negara, serta semangat persaudaraan antarumat Islam.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis framing Robert Entman, dapat disimpulkan bahwa Tempo dan Kompas.com memiliki konstruksi realitas yang berbeda terhadap isu perbedaan Idul Fitri 1447 H. Tempo membingkai isu sebagai persoalan diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama. Media ini menonjolkan kasus-kasus intoleransi terhadap Muhammadiyah serta pentingnya perlindungan hak beragama dalam masyarakat plural. Sebaliknya, Kompas.com membingkai isu sebagai persoalan persatuan umat dan legitimasi pemerintah dalam menentukan Hari Raya Idul Fitri. Media ini lebih menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial, menghormati keputusan pemerintah, dan mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan framing tersebut menunjukkan bahwa media memiliki cara masing-masing dalam memilih dan menonjolkan fakta sehingga

menghasilkan pemahaman yang berbeda di tengah masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model framing lain, seperti model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki atau model William A. Gamson, agar diperoleh hasil analisis yang lebih beragam dan mendalam mengenai konstruksi media. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan kajian tidak hanya pada teks berita, tetapi juga pada aspek visual, seperti penggunaan foto, ilustrasi, judul, dan tata letak berita dalam membangun framing media. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Fika. 2019. "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6(1):112-43.
- Hafidli, Muhammad Nabil, Rianne Nur Dwi Lestari Sasmita, Luthfiah Nurazhari, and Nazma Rahisa Gumilang Putri. 2023. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Kasus Kanjuruhan Di Detikcom Dan Bbc News." *Jurnal Ilmu Sosial* 3(1):178-83.
- Hidayat, Rahmat, and Fajar Hamdan Prasetyo. 2023. "Analisis Framing Model Robert N Entman Pada Berita Larangan Mudik 2021 Di Media Detikcom Dan Kompas. Com." *Journal Communication Lens* 2(2):1-1.
- Kompas. n.d. "https://Nasional.Kompas.Com/Read/2026/03/19/21071571/Mui-Sebut-Penetapan-Idul-Fitri-Kewenangan-Pemerintah-Umat-Diminta-Jaga."
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyana, DR Deddy. 2002. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Lkis Pelangi Aksara.
- Mushonnif, Ahmad. 2013. "Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah Dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 3(2):165-79.
- Muzakkir. 2020. *Etika Jurnalis Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Jakarta: Kencana.
- Safitri, Triana Nur, Maudhy Satyadharma, and Patta Hindi Asis. 2025. "Media Online Dan Penguatan Nasionalisme (Studi Kasus Pemberitaan Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara)." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4(02). <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/juperan/article/view/1123>.
- Sari Lubis, Mayang. 2013. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish,.
- Sofian, Arik, and Niken Lestari. 2021. "Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Covid-19 (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Media Online Koran. Tempo. Co Edisi Maret 2020)." *Commicast* 2(1):58-70.
- Sugiarti, Ayu, and Muhammad Kudhori. 2024. "Pemimpin Dan Feedback Rakyat Di Indonesia Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 9(2):144-66.
- Sugiyono,. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta,.
- Tempo. n.d. "https://Www.Tempo.Co/Politik/Setara-Kritik-Diskriminasi-Akibat-Perbedaan-Idul-Fitri-2124025."
- Widiantari, Komang Salsa Dila. 2025. "Upaya Penyelesaian Sistem Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Kasus Penipuan Penjualan Kosmetik Melalui Media e-Commerce Di Indonesia." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2(2):78-89.